

---

**KOMITMEN POLITIK PENETAPAN UPAH MINIMUM DI MASA  
PEMERINTAHAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG  
PERIODE 2016-2021**

**Didi Suheri**

Universitas Satyagama

Jl. Kamal Raya No. 2A Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11730, Indonesia

Email: didi.suheri@gmail.com

ARTICLE  
INFO

**Article history:**

*Received:*

10 January 2025

*Revised:*

12 January 2025

*Accepted:*

12 January 2025

**Kata Kunci:** Komitmen Politik; Kelompok Kepentingan; Konflik Politik; Upah Minimum Kabupaten; Upah Minimum Sektoral Kabupaten

**Keywords:** Political Commitment; Interest Groups; Political Conflicts; District Minimum Wage; District Sectoral Minimum Wage

**Abstrak**

Kenaikan upah minimum di Kabupaten Karawang yang terjadi setiap tahunnya pada masa pemerintahan Bupati Cellica Nurachadiana merupakan wujud komitmen politik dengan Serikat Buruh pada Pilkada 2015. Relasi dan konflik Bupati dengan Serikat buruh cenderung landai, hal ini karena Bupati lebih akomodatif terhadap kepentingan buruh hal ini juga di perkuat dengan adanya komitmen politik. Sementara relasi Bupati dengan Apindo cenderung kurang baik, hal ini disebabkan Bupati tidak akomodatif terhadap kepentingan pengusaha, hal ini dibuktikan pada penetapan UMSK Tahun 2019 yang mal administrasi. Dalam prosesnya Bupati memiliki peran dominan dalam menetapkan rekomendasi kenaikan upah dan cenderung akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peran Cellica Nurachadiana mulai di lihat oleh para serikat buruh karena dalam kepemimpinannya menjadi plt Bupati, UMK dan UMSK di Karawang naik melambung tinggi selama pemerintahan Cellica.

**Abstract**

The increase in the minimum wage in Karawang Regency which occurs every year during the administration of Regent Cellica Nurachadiana is a form of political commitment with the Labor Union in the 2015 Pilkada. The relationship and conflict between the Regent and the Labor Union tend to be flat, this is because the Regent is more accommodating to the interests of workers, this is also strengthened by the existence of political commitment. Meanwhile, the relationship between the Regent and Apindo tends to be less good, this is because the Regent is not accommodating to the interests of employers, this is evidenced by the determination of the 2019 UMSK which was maladministrated. In the process, the Regent has a dominant role in determining recommendations for wage increases and tends to abuse his power for practical political interests. The research method used is qualitative descriptive. The role of Cellica Nurachadiana began to be seen by the labor unions because during her leadership as acting Regent, UMK and UMSK in Karawang soared during Cellica's administration.

## PENDAHULUAN

Industrialisasi yang terjadi di Karawang memberikan angin segar kepada angkatan kerja di Karawang, karena tersedianya lapangan kerja, masyarakat berpeluang untuk berkerja di perusahaan-perusahaan kapitalistik dengan upah yang layak. Dalam prakteknya dalam sistem pengupahan terdiri dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Lantas apa itu upah minimum ? Berdasarkan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok (termasuk tunjangan tetap) yang telah ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah ini wajib dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan dan para pelaku industri sebagai standar minimal dalam memberikan upah kepada karyawannya.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) ditetapkan oleh gubernur, sementara Pemkab bertugas menyusun dan menggodok rekomendasi kenaikan UMK yang dilakukan di Dewan Pengupahan Kabupaten. Dewan Pengupahan ini terdiri dari Dinas Ketenagakerjaan, Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Dalam proses penyusunan rekomendasi kenaikan UMK kerap kali memunculkan perselisihan antara Serikat Buruh dan APINDO karena masing-masing dari kelompok tersebut memiliki kepentingan yang berbeda.

Kelompok kepentingan dibentuk untuk lebih memperkuat dan mengefektifkan tuntutan-tuntutan individu itu telah ada dan aktif dalam kehidupan politik sepanjang sejarah (Mosoed, 2016). Kelompok Kepentingan juga bisa diartikan sebagai sebuah organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam bidang tertentu yang memiliki arti penting bagi para anggota (Ethridge dan Handelman, 2016).

Pemerintah Kabupaten Karawang kebijakannya selalu berpihak pada Serikat Buruh, semisal pada penetapan UMSK Tahun 2019, pihak Pengusaha yang dalam hal ini APINDO tidak dilibatkan dalam penetapan UMSK, Bupati menetapkan UMSK secara sepihak padahal jelas dalam PP 78 Tahun 2015, pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Keberpihakan Pemerintah Karawang dalam hal ini Bupati kepada Serikat Buruh apakah sebagai komitmen politik pada Pilkada 2015 mengingat Buruh merupakan komoditas politik yang sangat strategis untuk mendulang suara.

Penelitian ini saya tulis untuk menjawab pertanyaan apakah kenaikan upah minimum di Kabupaten Karawang merupakan wujud komitmen politik, untuk menjawab pertanyaan itu, pertama saya akan membahas terlebih dahulu kebijakan pengupahan di Kabupaten Karawang, kemenangan Cellica- Jimmy di Pilkada Karawang Tahun 2015 serta signifikansi suara buruh terhadap kemenangan Cellica- Jimmy.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan non-random sampling atau lebih dikenal dengan teknik purposive sampling dimana kriteria-kriteria tertentu ditetapkan untuk mendapatkan informan yang selektif dan tepat sasaran dengan penelitian yang dilakukan. Sampel penelitian yang digunakan adalah tim pemenang calon Bupati Karawang tahun 2016-2021 yaitu ketua Sarbumusi Karawang, Pupung Syiful Kamil dan Ketua Korp Komando Relawan Pemenangan Cellica-Jimmy. Data dikumpulkan dan dianalisa dengan deskriptif analisis terkait dengan komitmen atas penetapan upah minimum di kabupaten karawang pada periode 2016-2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pengupahan di Kabupaten Karawang

Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja. Pengertian ini mengimplementasikan bahwa istilah upah terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya sebagai perwujudan dari kontrak yang telah disepakati dengan pihak pemberi kerja. upah dapat diberikan baik dalam bentuk tunai atau natura, sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya dibentuk berdasarkan kepada fungsi dasar upah, yang menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.

Pada dasarnya penghasilan yang diterima karyawan digolongkan dalam empat bentuk yaitu upah atau gaji, tunjangan dalam bentuk natura (seperti beras, gula dan pakaian), fringe benefits (dalam bentuk dana yang disisihkan pengusaha dan diperuntukkan sebagai dana pensiun, asuransi kesehatan, kendaraan dinas, makan siang), serta perbaikan kondisi lingkungan kerja. Sistem penggajian di Indonesia pada umumnya menggunakan basis berupa gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja. Pangkat seseorang umumnya didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, penentuan gaji pokok didasarkan pada prinsip-prinsip teori human capital, yaitu bahwa upah atau gaji seseorang diberikan sebanding dengan tingkat pendidikan dan pelatihan yang telah dijalani.

Karakteristik dasar sistem pengupahan yang terdapat dalam kontrak kerja antara pekerja dan perusahaan terdiri atas dua, yaitu penetapan upah per satuan output (*piece rates*) dan upah per jam (*time rates*). Pemilihan jenis pengupahan ini akan mempengaruhi banyak aspek, antara lain produktivitas tenaga kerja dan tingkat keuntungan perusahaan. Pemilihan sistem pengupahan sering menimbulkan konflik antara pengusaha dan pekerja yang bersumber dari ketidaktahuan pengusaha mengenai beban pekerjaan sebenarnya yang ditanggung pekerja, sementara di sisi lain pekerja cenderung menginginkan upah yang tinggi dengan beban kerja sekecil mungkin. Sistem upah per satuan output memberikan kompensasi kepada pekerja berdasarkan pada output yang dihasilkan. Sebagai contoh pekerja garmen dibayar berdasarkan pada seberapa banyak jumlah pakaian yang dihasilkan dan para tenaga penjual dibayar sesuai dengan jumlah unit yang terjual. Sedangkan sistem upah per jam sangat bergantung kepada jumlah jam kerja yang dialokasikan pekerja dalam melakukan pekerjaannya dan tidak berhubungan sama sekali dengan jumlah output yang dihasilkan pekerja.

Konsep upah minimum yang terbaru muncul pada 2006 berdasarkan Permenaker No 17/Men/2005 tentang komponen dan penetapan kebutuhan hidup layak. Pada waktu itu ada 7 kelompok yang mencakup 46 komponen (KHL), antara lain makanan minuman ada 11 komponen, sandang 9 komponen, perumahan 19 komponen, pendidikan 1 komponen, kesehatan 3 komponen, transportasi 1 komponen, dan rekreasi-tabungan ada 2 komponen.

Kemudian jumlah komponen KHL direvisi melalui Permenakertrans No 13 tahun 2012 tentang KHL. Jumlah komponen KHL bertambah menjadi 60 komponen, antarlain makanan minuman 1 komponen, sandang 13 komponen, perumahan 26 komponen, pendidikan 2 komponen, kesehatan 5 komponen, transportasi 1 komponen dan rekreasi-tabungan 2 komponen.

Gubernur Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat di 2021 sebesar Rp 1,810,350. Angka ini sama dengan UMP Tahun 2020. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor 561/kep.722/Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

#### **Kemenangan Cellica- Jimmy di Pilkada Karawang Tahun 2015**

Pemilihan umum Bupati Karawang 2015 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karawang periode 2016-2021. Pelaksanaan pemilihan umum ini bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015. Terdapat enam pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke KPU Karawang.

Hasil Rekapitulasi Suara KPU Karawang sebagai berikut: Paslon Nace-Yenih memperoleh suara 22.538 (2,16%), Akhmad Marjuki-Dedy Suwandi memperoleh suara 197.744 (18,98%), Cellica-Ahmad Zamaksyari memperoleh suara 531.195 (51,00%), Daday-Edy memperoleh suara 80.969 (7,77%), Nanan-Askun memperoleh suara 9.051 (0,87%), Saan Mustopa-Imam memperoleh suara 200.112 (19,21%)

Sementara itu total suara tidak sah sebanyak 23.226, suara sah sebesar 1.043.225 (97,89%), Pemilih terdaftar sebesar 1.588.371 (KPU Karawang). Kontestasi tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan Cellica-Jimmy dengan perolehan 51% suara. Kemenangan pasangan Cellica-Jimmy tidak terlepas dari dukungan para Serikat Buruh. Mereka merasakan dampak dari kebijakan Cellica Nurachdiana semenjak menjabat PLT Bupati, UMK Karawang menjadi juara atau terbesar se-Indonesia. Atas dasar kebijakannya yang pro terhadap nasib buruh, delapan serikat buruh mendeklarasikan diri mendukung paslon Cellica-Jimmy di Pilkada Karawang tahun 2015. Adapun delapan serikat buruh tersebut diantaranya Federasi Serikat Pekerja Lem SPSI, TSK SPSI, RTM SPSI, KEP SPSI, SPN, KASBI, FSPMI, dan PPMI.

Menurut Ketua RTM SPSI, Ahmad Gozali mengungkapkan selama tiga tahun berturut-turut Karawang menjadi juara UMK se-Nasional, termasuk juara UMK pada masa pemerintahan Cellica tahun ini. Sehingga bagi buruh tidak ada alasan untuk mendukung pencalonan Cellica Jimmy. Selain itu kebijakan Cellica terhadap nasib buruh sudah bagus. Kehadiran Kang Jimmy sebagai Wakil Bupati diharapkan mampu menguatkan kebijakan pemerintah Cellica kedepan. Kenapa harus dukung Cellica Jimmy karena kami tidak mau disebut 'kacang lupa kulitnya'.

Ketua Korp Komando Relawan Pemenangan Cellica-Jimmy, Dudung Ridwan menambahkan setelah Karawang juara UMK se-Indonesia, buruh juga punya alasan lain kenapa harus mendukung Cellica-Jimmy, yaitu dimana buruh sudah membuat komitmen agar pemerintahan Cellica-Jimmy kedepan mampu merealisasikan Perda Ketenagakerjaan, serta memberikan bantuan usaha kecil kepada organisasi Serikat Buruh (Muklis, 2020).

Biasanya dalam batas-batas hukum yang ketat, kelompok kepentingan dapat memengaruhi pemerintah dengan berkontribusi dengan kampanye Pemilu. Uang adalah kontribusi yang paling umum, tetapi kelompok kepentingan sering juga memberikan sumbangan berupa tenaga sukarelawan dan barang atau jasa untuk membantu seorang kandidat dalam sebuah pemilu (Ethridge dan Handelman, 2016).

Keterlibatan serikat buruh dalam politik praktis sudah menjadi hal yang lumrah dan sering terjadi di momen Pemilu baik Pilpres, Pilgub maupun Pilkada. Kepentingan politik atau kepentingan kesejahteraan bagi buruh di Indonesia menjadi bahan pertimbangan yang cukup dilematis. Tak bisa dipungkiri kepentingan politik juga didasari oleh perjuangan para buruh untuk mendapatkan kesejahteraan.

Dosen Ketenagakerjaan Pascasarjana Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai pergerakan serikat buruh di Indonesia tidak lagi efektif memfasilitasi kepentingan buruh dan malah cenderung mendekati kepentingan politik dengan berafiliasi dengan partai politik. Kepentingan untuk memperjuangkan hak sesama buruh selama ini dianggap tak terakomodasi dengan baik (Hardi, 2020).

Kini status buruh cenderung menjadi komoditas dari kepentingan politik praktis. Tak ada jaminan serikat pekerja mendekati kelompok elite partai politik bisa memperjuangkan hak buruh, pun tak ada jaminan dukungan buruh tidak dimanfaatkan sebagai kendaraan elite partai politik untuk meraih suara. Sementara yang terjadi di Karawang, jika banyak pihak menganggap suara buruh hanya dimanfaatkan oleh penguasa politik belaka, Bupati Karawang Periode 2016-2021, dr. Cellica Nurachadiana malah sangat berpihak pada buruh, hal itu sebagai komitmen politiknya dengan para serikat buruh di Karawang.

Menurut Ketua Korp Komando Relawan Pemenangan Cellica- H. Ahmad Zamakhsyari, Dudung Ridwan mengatakan bahwa Bupati Cellica telah membuktikan komitmen politiknya kepada buruh, sepanjang ia menjabat, UMK Karawang selalu menjadi yang tertinggi di Indonesia, jika pada awalnya UMK Karawang selalu dibawah Kabupaten Bekasi kini berhasil melampauinya (Wawancara dengan Dudung Ridwan, 2021).

### **Signifikansi Suara Buruh Terhadap Kemenangan Cellica- H. Ahmad Zamakhsyari**

Dalam kontestasi Pemilu suara buruh selalu menjadi perebutan, ini terjadi bukan hanya di Karawang tetapi disetiap daerah yang memiliki industri. Serikat Buruh sebagai organisasi masa yang memiliki anggota sangat besar menjadi disegani oleh para elite politik di Indonesia. Jika Serikat Buruh kita klasifikasikan berdasarkan teori Almond dan Powell, posisi serikat buruh menjadi kelompok nomor empat yaitu kelompok assosiasional, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok assosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang tertentu yang menjadi fokusnya.

Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengatakan suara buruh bisa menambah perolehan suara meskipun tidak cukup signifikan. Pasalnya, suara buruh tidak bulat karena ada perbedaan pandangan politik di masing-masing organisasi. Misalnya, pada Pemilu Presiden 2014 tetap ada dua serikat buruh, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang mendukung Jokowi-JK.

Lebih jauh, Usep mengatakan suara buruh akan berpengaruh signifikan jika kondisi organisasi seperti era orde baru diterapkan. Saat itu hanya satu organisasi golongan profesi tertentu yang diakui pemerintah. Misalnya, PGRI yang menaungi para guru atau Kerukunan Tani Indonesia (KTI) yang menaungi para petani. Sehingga, suara di dalam organisasi itu tidak terpecah. Pasca reformasi, banyak bermunculan organisasi dari golongan yang sama. Begitupun pada buruh. Hingga saat ini banyak organisasi buruh yang tersebar hingga ke level paling kecil. Organisasi-organisasi itu belum tentu mempunyai kepentingan politik yang sama (Hizik, 2020).

Serikat buruh yang mendukung paslon dalam perhelatan Pilkada di Karawang maupun di daerah lain tentu memiliki motif dan komitmen antara pihak Serikat Buruh dengan paslon yang nantinya akan dipilih. Komitmen politik dari berbagai serikat buruh yang mendukung paslon petahana, Cellica Nurachadiana- H. Ahmad Zamakhsyari (Jimmy) seperti sudah dijelaskan diatas bahwa buruh meminta pemerintahan Cellica- Jimmy merealisasikan Perda Ketenagakerjaan serta memberikan bantuan usaha kecil kepada organisasi Serikat Buruh.

Serikat Buruh sebagai kelompok kepentingan sejalan dengan teori yang dikemukakan Janda, Barry dan Goldman bahwa kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan. Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya. Teori ini sangat menggambarkan kondisi yang terjadi di Kabupaten Karawang, bahwa Serikat Buruh sangat memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan Bupati, bagaimana tidak, pada penetapan UMSK Tahun 2019, Bupati tetap merekomendasikan kenaikan UMSK kepada Gubernur meskipun pihak pengusaha melalui Apindo tidak menyetujuinya. Peran Elite Politik dalam hal ini Bupati sangat memiliki pengaruh yang besar dalam proses penetapan UMSK di Kabupaten Karawang.

Menurut Ketua Korp Komando Relawan Pemenangan Cellica-Jimmy, Dudung Ridwan mengatakan bahwa komitmen politik antara Bupati Cellica dengan Serikat Buruh memang terjadi di Pilkada 2015 dan di Pilkada 2020 kemarin. Keduanya bersepakat bahwa UMK Kabupaten harus menjadi juara.

Tuntutan Buruh adalah menjadikan UMK Karawang juara. Dan itu dibuktikan oleh Cellica, sebelumnya UMK karawang itu selalu di bawah Kabupaten Bekasi, semenjak kepemimpinan Cellica dari mulai menjabat sebagai plt Bupati sampai sekarang UMK Karawang selalu menjadi juara. Cellica sangat komitmen dalam memperjuangkan nasib buruh, lihat saja semenjak kepemimpinan Cellica nyaris tidak pernah ada demo Buruh ke kantor Pemerintah Daerah (Wawancara dengan Dudung Ridwan, 2021).

Dudung Ridwan juga menyinggung mengenai penetapan UMSK Tahun 2019 yang menjadi polemik dan mendapatkan sorotan dari Ombudsman Jawa Barat, hal itu juga karena di dorong oleh laporan APINDO, bahwa penetapan UMSK Tahun 2019 mal administrasi.

Cellica berani pasang badan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh, meskipun harus melakukan kekuasaannya sebagai Bupati, karena memang dalam setiap perundingan di Dewan Pengupahan Karawang, pihak APINDO dan Serikat Buruh tidak pernah ada kata sepekat, sementara Pemkab juga di kejar waktu harus segera memberikan rekomendasi kepada Gubernur. Ditegurunya Bupati dan Kepala Disnakertrans Karawang tahun 2019, tentu itu juga menjadikan Buruh semakin cinta sama Cellica (Wawancara dengan Dudung Ridwan, 2021).

Sementara itu, Ketua Sarbumusi Karawang, Pupung Syiful Kamil senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua Korp Komando Relawan Pemenangan Cellica-Jimmy, bahwa telah ada komitmen politik Cellica dengan Serikat Buruh untuk mensejahterakan kehidupan buruh dengan kebijakan UMK yang tinggi.

Komitmen buruh ke Cellica cuma satu yaitu agar UMK Karawang menjadi juara. Dan itu sudah dibuktikan oleh Cellica. Bahkan di Pilkada 2020 kemarin, saat ia di cutikan sementara, dia mengawal kebijakan UMK Karawang tetap juara, Cellica waktu itu telepon kepada Kepala Disnaker untuk menunggu dulu nominal yang di rekomendasikan oleh Kabupaten Bekasi, setelah keluar, Cellica mengintruksikan UMK Karawang harus diatas Bekasi. Cellica sangat pro terhadap buruh, nyaris selama kepemimpinannya tidak ada demo buruh. komitmen kita dengan cellica hanya itu saja, serikat pekerja yang berbasis buruh, memperjuangkan hak dan kesejahteraan itu lewat upah meskipun ada komponen lainnya tapi barometernya adalah upah, standarnya itu ya di UMK dan UMSK, maka Serikat Pekerja harus ada keterkaitan politik, termasuk di Pilkada 2020 kita berkomitmen dengan Cellica (Karawang juara, 2021).

Pupung Syaiful Kamil menambahkan sebelum dia menjabat Ketua Sarbumusi Karawang, ia menjadi pengurus PPMI, pada Pilkada 2015 posisi PPMI sendiri sedang berada di puncak, tercatat hampir ada 12.000 anggota. Dengan keanggotaan yang sangat banyak ini menjadi angin segar bari Cellica- Jimmy belum lagi dihitung keluarga para anggota PPMI. Pupung juga menegaskan bahwa para anggota serikat buruh sangat loyal terhadap perintah pimpinan organisasi. Solidaritas buruh sangat kuat di momen-momen politik Pilkada, Pilgub dan Pilpres, sementara untuk momen Pileg, suara buruh cenderung tidak solid (Wawancara dengan Dudung Ridwan, 2021).

Melihat dinamika yang terjadi dalam proses penetapan UMK terutama UMSK tahun 2019, terjadi tarik menarik kepentingan antar lembaga dan ini tentu menimbulkan konflik. Teori ini seringkali di defenisikan sebagai, a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests (Benditt 1975:34). Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Berry, & Goldman, 1997). Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Kelompok kepentingan adalah sebuah organisasi yang berusaha untuk memengaruhi kebijakan publik dalam bidang tertentu yang memiliki arti penting bagi para anggotanya (Ethridge dan Handelman, 2016). Output dari perundingan di Dewan Pengupahan berbentuk keputusan atau rekomendasi. Jika hal tersebut di analisis dengan menggunakan teori sistem David Easton maka dapat kita uraikan bahwa ada dua jenis pokok input-input suatu sistem politik yaitu tuntutan dan dukungan. Input-input inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus diproses oleh sistem itu dan juga energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem itu (Masoed dan Andrews, 2020).

Serikat Buruh maupun APINDO sebagai input yang memberikan tuntutan maupun dukungan pada sistem, mereka memberikan informasi atau bahan mentah semisal hasil kajian Serikat Buruh maupun APINDO mengenai kenaikan upah minimum yang kemudian diproses dalam perundingan di Dewan Pengupahan yang terdiri dari Serikat Buruh, APINDO, Pemerintah, dan Akademisi, dalam proses tersebut kemudian menghasilkan output berupa keputusan mengenai kenaikan upah minimum yang kemudian feedback nya berupa tanggapan dari keputusan tersebut.

Sampai sejauh ini saya telah menyatakan bahwa tidak ada satu pun sistem politik yang dapat menghasilkan output penting yang kita sebut keputusan-keputusan otoritatif kalau dukungan, disamping tuntutan tidak memperoleh jalan untuk masuk ke dalam sistem (Masoed dan Andrews, 2020).

Teori sistem David Easton sangat membantu para penulis maupun pengamat politik untuk mengurai suatu konflik yang ditimbulkan dari output. Karena sistem politik ini merupakan living organism, artinya ketika satu bagian sakit maka bagian lainnya pun akan merasakan sakit. Ketika kebijakan penetapan kenaikan upah minimum di Kabupaten Karawang dianggap mal adminsitrasasi seperti yang dituduhkan oleh APINDO berarti ada salah satu bagian dari sistem tersebut yang tidak berfungsi.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai proses penetapan upah minimum di Kabupaten Karawang dalam prosesnya menemukan banyak hambatan, diantaranya dalam proses musyawarah di Dewan Pengupahan Kabupaten, Serikat Buruh dan Apindo tidak pernah menemukan kata sepakat. Ini menyebabkan terjadinya konflik, Pemerintah mengambil jalan tengah dalam menetapkan besaran nilai kenaikan upah.

Bupati Cellica Nurachdiana sebelum menjabat sebagai Bupati Karawang, dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Karawang kemudian menjadi plt Bupati. Peran Cellica Nurachdiana mulai di lihat oleh para serikat buruh karena dalam kepemimpinannya menjadi plt Bupati, UMK dan UMSK di Karawang naik melambung tinggi selama pemerintahan Cellica. Bagi buruh tidak ada alasan untuk tidak mendukung pasangan calon Cellica- Jimmy di Pilkada 2015. Itu artinya dalam proses pemberian rekomendasi UMK dan UMSK bukan hanya sebatas hitungan ekonomi tetapi juga tidak luput dari kepentingan penguasa politik dalam hal ini Bupati untuk mendapatkan simpatik publik untuk modal mencalonkan diri kembali pada Pilkada 2020. Hal yang sama tidak menutup kemungkinan juga terjadi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

## REFERENSI

Jalil, Abdul. 2008. *Teologi Buruh*. LkiS; Yogyakarta.

Ingleson, John. 2015. *Buruh, Serikat, dan Politik*. Marjin Kiri; Tangerang Selatan.

Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta.

Ethridge, Marcus E dan Howard Handelman. 2016. *Politik Dalam Dunia yang Berubah*. Penerbit Nusa Media; Bandung.

Masoed, Mohtar dan Colin MacAndrews. 2016. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Muklis. 2020. Alasan 8 Serikat Buruh Dukung Calon Bupati Karawang. <https://www.pelitakarawang.com/2015/12/ini-alasan-8-serikat-buruh-dukung.html> (diakses pada 27 November 2020).

Hardi. 2020. Dampak Upah Minimum. <https://www.aturduit.com/articles/dampak-kenaikan-upah-minimum/> (diakses pada 30 September 2020).

Hizik. 2020. Arah Suara Buruh di 2019 dan Perpecahan Serikat Pekerja. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180425081625-32-293331/arah-suara-buruh-di-2019-dan-perpecahan-serikat-pekerja/> (diakses pada 2 September 2020).

Wawancara dengan Ketua Sarbumusi Karawang, Pupung Syaiful Kamil pada tanggal 13 Maret di kantor Sarbumusi.

Wawancara dengan Ketua Sarbumusi Karawang, Pupung Syaiful Kamil pada tanggal 13 Maret di kantor Sarbumusi.